

KONTRIBUSI *ASIAN PULP AND PAPER* MENGURANGI DEFORESTASI DALAM RANGKA MENDUKUNG *SUSTAINABLE DEVELOPMENTS GOALS* 13 DAN 15 DI INDONESIA

Oleh : Diva Siky Apriliani
Pembimbing : Dr. Pazli, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penurunan deforestasi merupakan indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 13 (penanganan perubahan iklim) dan 15 (perlindungan ekosistem darat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi *Asian Pulp and Paper* (APP) sebagai perusahaan industri kehutanan terbesar di Indonesia dalam mengurangi deforestasi di Indonesia melalui program *Sustainability Roadmap Vision 2030*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi dokumentasi dan analisis isi terhadap data sekunder, serta menerapkan teori efektivitas rezim Ronald B. Mitchell sebagai alat analisis utama. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana institusi non-negara seperti APP berkontribusi terhadap agenda global melalui tiga indikator: *output*, *outcome*, dan *impact*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APP telah menunjukkan keselarasan normatif dengan kerangka SDGs melalui kebijakan nol deforestasi, sertifikasi rantai pasok berkelanjutan, serta penerapan sistem monitoring berbasis teknologi. Capaian ini terutama terlihat pada level *output*, yakni pada formulasi kebijakan dan pelaporan. Walaupun demikian, pada level *outcome* dan *impact*, kontribusi APP belum dapat diverifikasi secara independen. Temuan ini diperkuat oleh sejumlah kritik dari organisasi lingkungan yang menyoroti tantangan dalam pengawasan rantai pasok dan keterlibatan masyarakat adat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kerangka efektivitas rezim, peran APP saat ini lebih menonjol dalam membangun legitimasi normatif melalui penyesuaian kebijakan dan sistem pelaporan. Langkah-langkah tersebut sebagian besar dipicu oleh *independent self-interest* perusahaan, yaitu dorongan internal APP untuk menjaga reputasi, mempertahankan akses ke pasar global, serta merespons tekanan regulatif dan normatif dari pemangku kepentingan utama. Sementara itu, dampak ekologis yang terukur dari berbagai inisiatif keberlanjutan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemantauan jangka panjang dan audit independen agar kontribusinya terhadap pengurangan deforestasi dapat dinilai secara menyeluruh.

Kata Kunci : *Asian Pulp and Paper*, deforestasi, efektivitas rezim, keberlanjutan, SDGs.

ABSTRACT

The reduction of deforestation is a key indicator in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goals 13 (climate action) and 15 (life on land). This study aimed to analyze the contribution of Asia Pulp and Paper (APP) the largest forestry industry company in Indonesia in reducing deforestation through its Sustainability Roadmap Vision 2030 program. A descriptive qualitative approach was used, employing document analysis and content analysis of secondary data. The study adopted Ronald B. Mitchell's regime effectiveness theory as the main analytical framework, which evaluates non-state actor contributions using three indicators: output, outcome, and impact.

The findings showed that APP demonstrated normative alignment with the SDG framework through its zero-deforestation policy, sustainable supply chain certifications, and implementation of technology-based monitoring systems. These achievements were mostly evident at the output level, such as in policy formulation and reporting. However, at the outcome and impact levels, APP's contributions have not yet been independently verified. This limitation is echoed in critiques from environmental organizations concerning challenges in supply chain monitoring and indigenous community engagement.

Overall, the findings suggest that APP's current role in regime effectiveness lies primarily in establishing normative legitimacy through policy adjustments and reporting systems. These efforts appear to be driven by the company's independent self-interest—namely, to maintain its reputation, access global markets, and respond to regulatory and normative stakeholder pressures. Nevertheless, the ecological outcomes of these sustainability initiatives remain inconclusive and require further substantiation.

Keywords: Asian Pulp and Paper, deforestation, sustainability, SDGs, regime effectiveness

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling mendesak dalam pembangunan global abad ke-21.¹ Dalam konteks ini, deforestasi menjadi salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca, mengingat peran vital hutan tropis dalam menyerap karbon dioksida.² Indonesia sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, memiliki posisi strategis dalam upaya global pengendalian iklim.³ Namun, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara dengan laju deforestasi tercepat, yang mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Menurut data Global Forest Watch (2023), Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2002 hingga 2022.⁴ Sebagian besar kehilangan ini terkait erat dengan ekspansi industri berbasis lahan seperti sektor pulp and paper.⁵ Kondisi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan emisi karbon, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Isu ini menjadi krusial karena terkait langsung dengan pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDGs 15 (Menjaga Ekosistem Daratan).

SDGs mendorong kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan melalui kebijakan dan praktik yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keterlibatan sektor swasta menjadi sangat penting, mengingat dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.⁶ Perusahaan diharapkan tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam meminimalkan dampak lingkungan serta berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang.⁷

Salah satu aktor utama dalam lanskap industri kehutanan di Indonesia adalah Asian Pulp and Paper (APP), perusahaan multinasional yang mengelola lahan konsesi dalam skala besar.⁸ APP telah lama menjadi sorotan berbagai pihak akibat praktik deforestasi dan konflik lahan

¹ United Nations, "Sustainable Development Goals : Climate Change, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>, (diakses pada 11 September 2023)

² United Nations Convention to Combat Desertification. (n.d.). *Global Land Outlook: Overview*. Diakses dari <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/overview>.

³ Aprillia, D. M., & Pazli. (2016). Faktor-faktor penghambat implementasi kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam skema REDD+ di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (2013–2015). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, 3(2), 1–15. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/10491>

⁴ *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. Global Forest Watch. Diakses 30 Juli 2024. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?lang=id>

⁵ Eyes on the Forest. (2007). *New APP logging road threatens one of world's biggest carbon-storing forests*. Diakses dari

<https://www.eyesontheforest.or.id>

⁶ Pattberg, P., & Widerberg, O. (2016). Transnational multistakeholder partnerships for sustainable development: Conditions for success. *Ambio*, 45(1), 42–51. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0684-2>

⁷ Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). *Sustainable development report 2019*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment-report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf

⁸ *Forests & Finance*. (2019). *Asia Pulp and Paper (APP) case study on Indonesian pulp industry dominance and environmental impact*. Diakses dari <https://forestsandfinance.org/case-studies/asia-pulp-and-paper/>

dengan masyarakat adat.⁹ Kritik terhadap operasional APP mencuat pada awal 2000-an, terutama dari lembaga swadaya masyarakat internasional seperti Greenpeace.¹⁰ Merespons tekanan global tersebut, pada tahun 2013 APP meluncurkan kebijakan Forest Conservation Policy (FCP) yang disertai dengan peta jalan keberlanjutan bertajuk Sustainability Roadmap: Vision 2020.¹¹ Inisiatif ini mencakup komitmen untuk menghentikan konversi hutan alam, meningkatkan konservasi, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasoknya.¹²

APP juga berinisiatif menyelaraskan arah kebijakan keberlanjutannya dengan kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 13 dan 15 yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pelestarian ekosistem darat. Dalam sejumlah dokumen perusahaan, APP menyebutkan telah mengadopsi panduan seperti *SDGs Compass* dan *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk memperkuat transparansi pelaporan serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses tersebut.¹³ Berbagai inisiatif internal pun telah dikembangkan untuk menunjang agenda keberlanjutan tersebut. Meskipun berbagai komitmen telah diumumkan, perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana bentuk kontribusi APP dalam praktiknya, khususnya dalam kaitannya dengan pengurangan deforestasi dan pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 13 dan 15.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Asian Pulp and Paper dalam mengurangi deforestasi di Indonesia serta menilai sejauh mana inisiatif keberlanjutan yang dijalankan perusahaan tersebut selaras dengan pencapaian SDGs 13 dan 15. Kajian ini penting untuk memahami peran sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan, serta menelaah bagaimana tekanan regulatif dan normatif dapat mendorong perubahan kebijakan perusahaan menuju praktik yang lebih kolaboratif dan bertanggung jawab secara ekologis.

KERANGKA TEORI

1. Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional menekankan bahwa identitas, norma, dan ide memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku aktor global, termasuk negara dan korporasi. Berbeda dari pendekatan rasionalis yang melihat kepentingan sebagai tetap dan objektif, konstruktivisme memandang bahwa kepentingan dibentuk secara sosial melalui interaksi dan pemahaman bersama.¹⁴

Alexander Wendt menjelaskan bahwa struktur sosial terdiri atas kondisi material, pengetahuan bersama (*shared knowledge*), dan praktik sosial. Identitas dan

⁹ Environmental Paper Network, & Forest Peoples Programme. (2019, 1 Oktober). *New study reveals Asia Pulp & Paper involved in hundreds of conflicts with local communities as haze crisis intensifies*. Business & Human Rights Resource Centre. Diakses dari <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-study-reveals-asia-pulp-papers-involvement-in-hundreds-of-community-conflicts/>

¹⁰ Mongabay. "Asia Pulp & Paper Fumbles Response to Deforestation Allegations by Greenpeace." *Mongabay Environmental News*, 28 September 2010. Diakses pada 30 Juli 2025, dari [https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace.](https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace/)

¹¹ Mongabay. "Asia Pulp & Paper Fumbles Response to Deforestation Allegations by Greenpeace." *Mongabay Environmental News*, 28 September 2010. Diakses pada 30 Juli 2025, dari [https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace.](https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace/)

¹² Ibid.

¹³ Asia Pulp & Paper. (2013). *Sustainability Roadmap: Vision 2020 and Forest Conservation Policy*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/>

¹⁴ Wendt, A. (1992). *Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics*. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>

kepentingan para aktor tidak bersifat tetap, tetapi terbentuk secara dinamis melalui interaksi sosial dan budaya.

Dalam konteks ini, institusi seperti perusahaan multinasional bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan aktor sosial yang dipengaruhi oleh norma internasional yang berlaku. Misalnya, adopsi prinsip keberlanjutan oleh korporasi dapat dilihat sebagai respons terhadap tekanan normatif global, bukan semata karena pertimbangan ekonomi.¹⁵

Oleh karena itu, perspektif konstruktivisme relevan dalam menjelaskan bagaimana norma global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) membentuk perilaku aktor domestik dan transnasional. Adopsi SDGs oleh Asian Pulp and Paper (APP) mencerminkan bentuk internalisasi norma keberlanjutan melalui interaksi sosial dan ekspektasi global, yang berdampak pada kontribusi mereka terhadap pengurangan deforestasi dan pencapaian SDGs 13 dan 15 di Indonesia.

2. Teori Efektivitas Rezim

Dalam studi hubungan internasional, *rezim internasional* dipahami sebagai seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur perilaku aktor-aktor dalam isu tertentu di tingkat global.¹⁶ Rezim berperan sebagai instrumen kelembagaan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kolektif seperti isu lingkungan, dengan menciptakan struktur yang mendorong

koordinasi, kolaborasi, dan kepatuhan antar aktor, baik negara maupun non-negara.

Ronald B. Mitchell mengembangkan teori efektivitas rezim dengan pendekatan evaluatif yang tidak semata-mata menilai pencapaian tujuan formal, melainkan menekankan tiga indikator utama:

1. *Output* – hasil langsung dari kerja rezim, seperti kebijakan, perjanjian, atau program aksi;
2. *Outcome* – perubahan perilaku nyata dari aktor sebagai akibat internalisasi norma dan aturan rezim;
3. *Impact* – dampak konkret terhadap permasalahan substantif, misalnya penurunan tingkat deforestasi atau peningkatan kualitas lingkungan.¹⁷

Mitchell menyoroti pentingnya desain kelembagaan sebagai penentu efektivitas rezim. Mekanisme seperti pengawasan, pelaporan, transparansi, sistem insentif, dan sanksi menjadi komponen krusial dalam menumbuhkan tekanan kepatuhan.¹⁸ Kepatuhan yang konsisten tidak hanya memperkuat legitimasi rezim, tetapi juga mendorong partisipasi aktor baru dan memperluas penerimaan norma global.¹⁹

Ia juga memperkenalkan konsep *independent self-interest*, yaitu dorongan kepatuhan berdasarkan keuntungan strategis, ekonomi, atau reputasional yang dirasakan oleh aktor.²⁰ Dengan demikian, keberhasilan suatu rezim tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum

¹⁵ Ruggie, J. G. (2004). Reconstituting the global public domain: Issues, actors, and practices. *European Journal of International Relations*, 10(4), 499–531.

<https://doi.org/10.1177/1354066104047847>

¹⁶ Mitchell, R. B. (2008). Evaluating the performance of environmental institutions. In O. R. Young, L. A. King, & H. Schroeder (Eds.), *Institutions and Environmental Change: Principal Findings, Applications, and Research Frontiers* (pp. 79–114). MIT Press

<https://academic.oup.com/edited-volume/42625/chapter/410435230>

¹⁷ Ibid

¹⁸ Mitchell, R. B. (2002). A quantitative approach to evaluating international environmental regimes. *Global Environmental Politics*, 2(4), 58–83. <https://doi.org/10.1162/152638002320980623>

¹⁹ Ibid

²⁰ Mitchell, R. B. (1994). Regime design matters: intentional oil pollution and treaty compliance. *International Organization*, 48(3), 425–458. <https://doi.org/10.1017/S0020818300028253>

formalnya, tetapi juga pada kemampuannya dalam menyelaraskan kepentingan global dengan rasionalitas aktor, termasuk korporasi dan masyarakat sipil.²¹

Secara keseluruhan, teori Mitchell menawarkan kerangka evaluatif yang komprehensif dan tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah proses internal, dinamika normatif, serta mekanisme insentif yang mendasari keberfungsian sebuah rezim internasional.

3. Level Analisis : Kelompok (Aktor Non-Negara)

Dalam studi hubungan internasional, level analisis merujuk pada kerangka konseptual untuk memahami perilaku aktor dalam sistem global. Umumnya, terdapat tiga level utama: individu, negara, dan sistem internasional.²² Namun, penelitian ini menggunakan level analisis kelompok/institusional, yang terletak di antara negara dan individu.

Pendekatan ini menyoroti peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dalam merespons tekanan dari lingkungan domestik maupun internasional. Fokus penelitian ini adalah pada Asian Pulp and Paper (APP) sebagai institusi yang menjalankan kebijakan keberlanjutan sejalan dengan agenda global, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) 13 dan 15.

Penggunaan level kelompok/institusional menjadi relevan karena APP, meskipun bukan aktor negara, memainkan peran strategis dalam membentuk dinamika hubungan internasional, terutama dalam isu perubahan iklim dan deforestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap kontribusi Asian Pulp and Paper (APP) dalam upaya mengurangi deforestasi untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 13 dan 15 di Indonesia, khususnya melalui implementasi *Sustainability Roadmap: Vision 2020*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sekunder seperti laporan tahunan perusahaan, publikasi dari lembaga internasional, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO). Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi terhadap isi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah dinamika implementasi kebijakan keberlanjutan dalam konteks korporasi melalui bukti empiris yang terdokumentasi, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Asian Pulp and Paper (APP) melalui situs resmi perusahaan. Dokumen tersebut memuat informasi terkait kebijakan, implementasi, serta komitmen APP dalam *Sustainability Roadmap: Vision 2020* yang selaras dengan tujuan SDGs 13 dan 15. Sebagai pelengkap, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dan situs resmi lembaga relevan

²¹ Ibid

²² Gebhard, C. (2022). *Levels of Analysis*. In S. McGlinchey (Ed.), *Foundations of International*

Relations. Bloomsbury. Diakses dari <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations/>

guna memperkuat kerangka teori dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motif Asian Pulp and Paper dalam berkontribusi mendukung capaian SDGs 13 dan 15 di Indonesia

Menurut teori efektivitas rezim yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell, aktor cenderung berpartisipasi dalam suatu perjanjian internasional ketika keterlibatan tersebut dianggap sejalan dengan kepentingan mereka sendiri (independent self-interest).²³ Sejalan dengan pandangan tersebut, partisipasi APP dalam program keberlanjutan dapat ditelusuri melalui sejumlah motif yang merepresentasikan kepentingan internal dan tekanan eksternal sebagai bagian dari efektivitas rezim.

1). Kepatuhan terhadap regulasi nasional

APP menjalankan program keberlanjutan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Perpres No. 59 tahun 2017 yang mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pencapaian SDGs dalam pendekatan kolaboratif²⁴ dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

mewajibkan pengusaha di bidang SDA untuk menjalankan CSR di bidang sosial dan lingkungan²⁵ yang erat kaitannya dengan SDGs.

2). Perbaikan citra perusahaan pasca teguran organisasi lingkungan

Pada periode 2009–2011, citra Asian Pulp and Paper (APP) mengalami tekanan signifikan akibat berbagai kampanye negatif dari organisasi lingkungan internasional seperti Greenpeace,²⁶ Eyes on the Forest,²⁷ dan Rainforest Action Network.²⁸ APP dituduh memiliki keterkaitan langsung dengan praktik deforestasi masif di hutan tropis Indonesia, yang kemudian mendorong pemutusan hubungan bisnis oleh sejumlah perusahaan global ternama seperti Mattel, Kraft, dan Unilever.²⁹ Tekanan publik mencapai puncaknya pada tahun 2011 melalui kampanye bertajuk “*Barbie, It’s Over*” yang diluncurkan oleh Greenpeace.³⁰

Kampanye ini mengekspos keterlibatan APP dalam rantai pasok produk berbahan dasar pulp dan kertas yang merusak lingkungan, sehingga menciptakan tekanan reputasional berskala global terhadap perusahaan.³¹ Situasi ini menjadi titik balik

²³ Mitchell, R. B. (1994). Regime design matters: intentional oil pollution and treaty compliance. *International Organization*, 48(3), 425–458. <https://doi.org/10.1017/S0020818300028253>

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/per-pres-no-59-tahun-2017>

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

²⁶ Greenpeace. (2010). *How Sinar Mas is Pulping the Planet*. Greenpeace International. <https://www.greenpeace.org/international/publicati-on/>

²⁷ Eyes on the Forest. (2008). *Deforestation in Riau*. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id>

²⁸ Rainforest Action Network. (2010). *Turning the Page on Rainforest Destruction: Why Asia Pulp & Paper is Not a Responsible Pulp Supplier*. Diakses dari <https://www.ran.org>

²⁹ Author not listed. (2010, September). *Asia Pulp & Paper fumbles response to deforestation allegations by Greenpeace*. Mongabay. Retrieved from <https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace/>

³⁰ Greenpeace Southeast Asia. (2011, October 5). *Success: Barbie and Mattel drop deforestation!* Diakses dari <https://www.greenpeace.org/southeastasia/story/1064/success-barbie-and-mattel-drop-deforestation/>

³¹ Author not listed. (2011, November). *War of words between Greenpeace, Asia Pulp & Paper over deforestation allegations*. Mongabay. Retrieved from <https://news.mongabay.com/2011/11/war-of-words-between-greenpeace-asia-pulp-paper-over-deforestation-allegations/>

penting bagi APP dalam membangun kembali legitimasi publiknya, yang ditandai dengan peluncuran *Forest Conservation Policy (FCP)* pada tahun 2013 dan kemitraan strategis dengan *Greenpeace* sebagai penasihat teknis kebijakan tersebut.³²

3). Respons terhadap Tekanan dan Harapan Pemangku Kepentingan

APP menyesuaikan kebijakan keberlanjutan sebagai respons terhadap tekanan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Konsumen menuntut produk bersertifikat FSC atau PEFC,³³ investor mulai mempertimbangkan kriteria ESG,³⁴ dan LSM berperan sebagai pengawas sekaligus mitra akuntabilitas.³⁵ Pemerintah memperkuat regulasi melalui PROPER,³⁶ SVLK,³⁷ dan UU No. 32 Tahun 2009.³⁸ Sebagai respons, APP merumuskan *Sustainability Roadmap Vision 2030* sebagai komitmen jangka panjang.

Integrasi program berkelanjutan APP dengan SDGs

Dalam rangka mendorong aktor negara maupun non-negara menjalankan prinsip

rezim internasional, strategi normatif bertujuan menciptakan perubahan mendalam dalam nilai, norma, dan tujuan para aktor, bukan sekadar mengubah cara pencapaian tujuan yang sudah ada.³⁹ Strategi ini berupaya membentuk ulang orientasi dan keyakinan para pelaku terhadap cara bertindak yang sesuai secara moral maupun praktis.

Dalam hal ini, Asian Pulp and Paper melakukan legitimasi terhadap rezim SDGs dan mengintegrasikannya ke dalam program *Sustainability Roadmap Vision 2030* pada tahun 2016. Dalam prosesnya, APP merujuk pada *SDG Compass*, yaitu sebuah panduan strategis yang dirancang untuk membantu sektor swasta menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB.⁴⁰

Dari kelima tahap dalam proses integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), APP telah melaksanakan pemetaan pemahaman, penentuan prioritas dan target, hingga pengintegrasian SDGs 13 dan 15 ke dalam program perusahaan. Fokus utamanya ditujukan pada upaya penurunan

[words-between-greenpeace-asia-pulp-paper-over-deforestation-allegations/](https://www.greenpeace.org/asia/pulp-paper-over-deforestation-allegations/)

³² APP. (n.d.). *Forest Conservation Policy*. Diakses pada 8 Oktober 2024, dari <https://app.co.id/in/forest-conservation-policy>

³³ PW Consulting. (2024). *What role do sustainability certifications play in shaping procurement strategies for pulp buyers?* pmarketresearch.com. Diakses dari <https://pmarketresearch.com/chemi/pulp-market/>

³⁴ Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>

³⁵ Ojo, M. (2019). *Role of NGOs in sustainable development: Addressing imbalances in global governance structures*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3479317>

³⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)*. Diakses dari <https://proper.menlhk.go.id>

³⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)*. Diakses dari <https://silk.menlhk.go.id/>

³⁸ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38715/uu-no-32-tahun-2009>

³⁹ Mitchell, R. B., & Chayes, A. H. (1998). *Managing compliance: A comparative perspective*. Dalam E. B. Weiss & H. Jacobson (Eds.), *Engaging countries: Strengthening compliance with international environmental accords* (hal. 39–62). MIT Press.

⁴⁰ Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, & World Business Council for Sustainable Development. (2015). *SDG Compass: The guide for business action on the SDGs*. Diakses dari <https://sdgcompass.org>

laju deforestasi melalui pengelolaan rantai pasokan serat yang berkelanjutan, pelestarian hutan, pencegahan kebakaran, serta restorasi kawasan hutan yang mengalami degradasi. Seluruh proses ini terdokumentasi secara sistematis dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), sebagai standar resmi pelaporan berkelanjutan yang diadopsi dalam kerangka SDGs.

Identifikasi Upaya APP dalam mengurangi deforestasi melalui *Forest Conservation Policy*

Forest Conservation Policy (FCP) merupakan inisiatif utama dari APP dalam upaya mengurangi deforestasi, yang menjadi bagian integral dari Sustainability Roadmap Vision 2020.⁴¹ Program ini secara eksplisit menegaskan komitmen APP terhadap kebijakan *zero deforestation* di seluruh rantai pasokannya. Kebijakan ini diluncurkan APP, khususnya setelah kampanye kritik yang masif dari *Greenpeace* dan organisasi lingkungan lainnya.

FCP memiliki empat komponen utama:

- 1) Penghentian deforestasi dan perlindungan seluruh hutan alam yang tersisa di dalam konsesi pemasok APP, termasuk kawasan *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS);
- (2) Pengelolaan dan restorasi lahan gambut secara bertanggung jawab, termasuk penerapan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut baru;
- (3) Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat; dan

⁴¹ Asia Pulp & Paper. (2013). *Sustainability Roadmap Vision 2020 and Forest Conservation Policy*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/>

- (4) Pengembangan rantai pasok yang transparan dan berkelanjutan melalui audit independen serta sistem penelusuran asal bahan baku.⁴²

Keempat prinsip tersebut menjadi fondasi dalam upaya APP membangun model bisnis berbasis konservasi, serta menjadi indikator penting dalam menilai kontribusinya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-13 (*Penanganan Perubahan Iklim*) dan ke-15 (*Menjaga Ekosistem Daratan*).

Upaya APP dalam mengurangi deforestasi dirancang dengan strategis karna terbagi atas upaya dari pemberlakuan rantai pasok yang berkelanjutan hingga melakukan restorasi terhadap hutan yang tergradasi.

1). Kebijakan Pengadaan dan Pembelian Serat (FPPP)

Rantai pasok yang transparan dan berstandar tinggi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem kehutanan yang berkelanjutan. Untuk itu, APP menerapkan sistem *Supplier Evaluation and Risk Assessment* (SERA) sebagai bagian dari kebijakan *Forest Conservation Policy* dan *Fibre Procurement and Purchasing Policy* (FPPP).

SERA merupakan sistem penilaian risiko yang dikembangkan secara khusus oleh APP untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko sosial dan lingkungan dari pemasok sebelum dilakukan pengembangan area baru. Sistem ini bersifat preventif dan wajib, terutama dalam konteks pembukaan lahan, untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak memicu konflik sosial, perusakan

⁴² Asia Pulp & Paper. (2013). *Forest Conservation Policy*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/forest-conservation-policy/>

ekosistem penting, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat adat.

Tujuan utama SERA adalah untuk menjamin bahwa setiap kegiatan dalam rantai pasok APP, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan, dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai prinsip keberlanjutan global.⁴³

Implementasi sistem SERA memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola rantai pasok APP. Melalui evaluasi yang ketat, APP mampu menolak calon pemasok yang tidak sesuai dengan prinsip NDPE, mencegah potensi deforestasi dan konflik sosial. Selain itu, transparansi data pemasok yang dilakukan secara publik turut memperkuat mekanisme akuntabilitas perusahaan, sejalan dengan prinsip good governance dalam pembangunan berkelanjutan.

2). Perlindungan hutan dari kebakaran

Integrated Fire Management (IFM) adalah pendekatan terpadu yang diterapkan oleh Asia Pulp and Paper (APP) untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesinya. Program ini dikembangkan sebagai respons terhadap tingginya insiden kebakaran hutan di Indonesia.

Dalam implementasinya program ini terbagi dalam beberapa elemen terpadu antara lain ;

a. Pencegahan kebakaran

Dalam tahap pencegahan upaya perlindungan hutan oleh APP menggunakan teknologi Early Warning Sistem (EWS) yang memantau cuaca, kelembaban tanah data hotspot melalui

satelit serta pemodelan risiko kebakaran untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. APP menggunakan teknologi sensor pencitraan radar RADARSAT-2

b. Pemantauan rutin

Sebagai bagian dari sistem *Integrated Fire Management* (IFM), APP mengimplementasikan *Smart Patrol System* untuk memantau kawasan konsesi secara berkala. Sistem ini mengandalkan patroli darat berbasis teknologi digital yang terintegrasi dengan aplikasi pelaporan geospasial secara real-time. Tim patroli lapangan terdiri dari personel terlatih yang dilengkapi perangkat GPS, kamera, dan sistem pelaporan mobile yang memungkinkan pelacakan lokasi, dokumentasi visual, serta pelaporan langsung terhadap anomali seperti indikasi pembukaan lahan ilegal atau potensi titik api.⁴⁴

Setiap rute patroli ditentukan berdasarkan prioritas risiko yang ditetapkan melalui analisis data historis kebakaran dan kondisi meteorologis harian. Hasil pemantauan disinkronkan dengan *Command Center* untuk analisis lebih lanjut dan tindak lanjut cepat.⁴⁵ Tim khusus ini juga berkoordinasi dengan masyarakat sekitar melalui skema Desa Siaga Api dan aparat lokal untuk memperkuat kapasitas respon dini dan mendorong kepatuhan terhadap praktik kehutanan berkelanjutan.

Selain patroli harian, APP menerapkan mekanisme pelaporan terstruktur melalui sistem *Fire Incident Reporting*, yang merekam setiap temuan di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kategori risiko. Data ini digunakan untuk evaluasi berkala

⁴³ Asian Pulp and Paper (2021). *Our Sustainability Report* 2021.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

terhadap efektivitas strategi pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, serta menjadi dasar dalam perencanaan penyesuaian strategi manajemen lanskap.

Seluruh sistem pemantauan ini terintegrasi dengan *Forest Alert System* dan dashboard pemantauan internal berbasis GIS (*Geographic Information System*), memungkinkan visualisasi risiko secara spasial dan temporal.⁴⁶ Dalam praktiknya, APP juga menerapkan audit internal dan verifikasi pihak ketiga guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi sistem ini. Evaluasi hasil patroli turut menjadi bahan rekomendasi untuk penguatan kapasitas tim lapangan dan pemutakhiran kebijakan mitigasi risiko kebakaran.

c. Penanganan Kebakaran

APP menerapkan protokol tanggap darurat berbasis *Integrated Fire Management* dengan sistem respons cepat. Setiap hotspot yang terdeteksi dikonfirmasi lapangan dalam waktu maksimal dua jam oleh tim darat. Tim pemadam terdiri dari personel terlatih, dilengkapi peralatan pemadaman, drone termal, dan sistem komando berbasis pusat kendali.

Penanganan juga didukung oleh 3.000 personel bersertifikasi, aplikasi pelaporan digital, serta kolaborasi dengan BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat lokal melalui program *Desa Makmur Peduli Api*.⁴⁷ Sistem ini memastikan kebakaran ditangani secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.

3). Pengelolaan Lahan Gambut

Asia Pulp and Paper (APP) menyadari bahwa perlindungan ekosistem gambut merupakan aspek krusial dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Sejak 2013, APP mengadopsi *Forest Conservation Policy (FCP)*, yang diikuti dengan penerapan strategi pengelolaan gambut berbasis ilmiah dan partisipatif. adapun upaya yang dilakukan APP untuk melestarikan lahan gambut adalah sebagai berikut ;

- a. Pemantauan Ketinggian Muka Air Tanah melalui jaringan sumur kontrol dan sensor digital menjaga kelembaban tanah pada ambang aman (> 40 cm) untuk mencegah dekomposisi dan kebakaran lahan. Data dikumpulkan secara real-time dan dianalisis untuk pengambilan keputusan cepat.
- b. Restorasi Lahan Gambut, dilakukan melalui penutupan kanal-kanal historis dan rewetting area gambut kering, serta penanaman vegetasi asli seperti *Shorea* dan *Melaleuca* untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.
- c. Peta Risiko Gambut dan Moratorium Pengembangan, disusun dengan bantuan teknologi LiDAR dan GIS, yang mengidentifikasi zona rawan subsiden dan emisi karbon tinggi. Area tersebut ditetapkan sebagai kawasan moratorium permanen.
- d. Kolaborasi Ilmiah dan Audit Independen, APP menggandeng lembaga riset internasional seperti Deltares, Universitas Wageningen, dan ahli gambut nasional untuk menyusun pendekatan berbasis data dan meninjau ulang efektivitas intervensi di lapangan.⁴⁸

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Sejak 2015, APP juga menginisiasi Peatland Restoration and Protection Program (PRPP) yang mencakup lebih dari 450.000 hektar lanskap prioritas. Program ini terintegrasi dengan pendekatan berbasis lanskap (*Integrated Landscape Management*) dan didesain mendukung tujuan SDGs 13 dan 15 khususnya dalam menjaga stok karbon alami, menurunkan risiko bencana ekologis, dan melindungi keanekaragaman hayati di ekosistem rawa gambut.⁴⁹

Dalam praktiknya, APP menghadapi tantangan teknis seperti dinamika hidrologi yang kompleks dan resistensi dari komunitas lokal terhadap perubahan praktik penggunaan lahan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat melalui program *community-based monitoring* dan *awareness campaign* menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang APP dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.

4). Kolaborasi dengan masyarakat lokal

Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) merupakan inisiatif sosial dari Asia Pulp & Paper (APP) dalam rangka pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program ini dikembangkan untuk menjawab tantangan struktural dalam pengelolaan kawasan hutan yang rentan terhadap kebakaran, terutama di wilayah-wilayah sekitar konsesi.⁵⁰

Tujuan utama DMPA adalah membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa agar tidak lagi bergantung pada praktik-praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. APP berupaya menciptakan

sistem yang saling menguntungkan antara keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara sistemik, DMPA melibatkan beberapa komponen utama:

- a. Identifikasi dan pemetaan sosial desa yang berada di sekitar konsesi perusahaan.
- b. Pendampingan intensif melalui fasilitator lapangan untuk mendorong praktik pertanian tanpa bakar dan kegiatan ekonomi alternatif.
- c. Pelatihan dan penyuluhan terkait pengelolaan lingkungan dan kebencanaan, termasuk edukasi bahaya karhutla.
- d. Integrasi dengan sistem pemantauan kebakaran dan tim IFM (*Integrated Fire Management*) untuk deteksi dini serta respons cepat jika terjadi kebakaran.
- e. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program dan perubahan perilaku masyarakat.⁵¹

Dari sisi dampak, laporan perusahaan menyebutkan bahwa program DMPA telah membantu mengurangi jumlah titik api secara signifikan di desa-desa partisipan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi mata pencaharian. Meski demikian, klaim-klaim keberhasilan ini tetap memerlukan evaluasi independen guna menjamin transparansi dan akuntabilitasnya.

Capaian Kinerja APP dalam mengurangi Deforestasi melalui Sustainability Roadmap Vision 2020

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Asian Pulp and Paper (APP) telah mencatat sejumlah capaian target dalam pelaksanaan *Sustainability Roadmap Vision 2020*, terutama pada pilar kehutanan yang berkaitan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 13 dan 15. Dalam aspek pengadaan bahan baku, sejak 2012 APP memastikan seluruh kayu untuk produksi pulp berasal dari pemasok yang legal dan telah diverifikasi secara independen.⁵² Sejak Februari 2013, APP mendeklarasikan komitmen *zero deforestation* melalui *Forest Conservation Policy* (FCP), yang mencakup moratorium pembukaan hutan alam dan lahan gambut, penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) terhadap masyarakat adat dan lokal, serta pelaksanaan penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*) dan kawasan stok karbon tinggi (*High Carbon Stock/HCS*).⁵³

Sebagai bagian dari upaya tata kelola lanskap yang berkelanjutan, APP telah menerapkan *Integrated Sustainable Forest Management Plans* (ISFMPs) di seluruh konsesi pemasoknya sejak 2017. Perusahaan juga meningkatkan transparansi dengan menerbitkan *Supplier Evaluation and Risk Assessment* (SERA), serta hanya menerima bahan baku bersertifikasi legal dan berkelanjutan seperti SVLK, PEFC, dan FSC Controlled Wood. Untuk mendorong ekonomi sirkular, penggunaan serat daur ulang ditargetkan mencapai 40% pada tahun 2020, dan realisasinya telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam bauran bahan baku.⁵⁴

Dalam aspek konservasi, APP melaporkan telah mencapai konservasi aktif terhadap lebih dari 600.000 hektare hutan melalui pendekatan lanskap terpadu, termasuk perlindungan terhadap habitat spesies kunci seperti harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*), dan orangutan. Program restorasi juga ditujukan untuk meningkatkan populasi spesies kunci sebesar 10%, sejalan dengan target *Key Species Conservation Program*.⁵⁵ Meski demikian, sejumlah capaian yang dilaporkan APP masih bersifat administratif dan berbasis pelaporan mandiri (*self-declared reporting*), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dampak ekologis yang konkret dan terukur.

Beberapa target yang diklaim telah tercapai dalam dokumen *Sustainability Roadmap Vision 2030* masih membutuhkan verifikasi independen dan pemantauan berbasis bukti (*evidence-based assessment*) guna memastikan efektivitas implementasi strategi keberlanjutan APP dalam mendukung agenda iklim (SDG 13) dan konservasi ekosistem daratan (SDG 15). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih mendalam untuk menilai sejauh mana komitmen *zero deforestation* benar-benar direalisasikan di tingkat tapak.

Asian Pulp and Paper (APP) memperoleh sejumlah pengakuan dari lembaga internasional atas strategi keberlanjutan yang dijalankannya, terutama dalam pelaporan, manajemen risiko lingkungan, dan tata kelola rantai pasok. Pada 2021, APP meraih skor A— dalam kategori

⁵² Asia Pulp & Paper Group. (2013, Februari 5). *Sustainability Roadmap Vision 2020 and Forest Conservation Policy (FCP)*. Diakses dari halaman FAQ FCP dan Sustainability Roadmap

⁵³ Asia Pulp & Paper Group. (2012, November 14). *Asia Pulp and Paper Achieves Highest Standards of Timber Legality Certification*. Diakses dari <https://app.co.id/-/asia-pulp-and-paper-achieves-highest-standards-of-timber-legality-certification>

⁵⁴ Asia Pulp and Paper. (n.d.). *Sustainability Roadmap Vision 2020*. Diakses dari <https://app.co.id/in/sustainability-roadmap-vision-2020>

⁵⁵ Asia Pulp & Paper. (n.d.). *Perkembangan Forest Conservation Policy (FCP) dalam Mendukung Konservasi Hutan di Indonesia*. Diakses dari <https://app.co.id/in/-/perkembangan-forest-conservation-policy-fcp-dalam-mendukung-konservasi-hutan-di-indonesia>

*Forests (Timber)*⁵⁶ dan B untuk *Climate Change* dari Carbon Disclosure Project (CDP),⁵⁷ menandakan sistem pelaporan dan pengelolaan risiko yang cukup memadai, meskipun sebagian besar masih berbasis pelaporan mandiri tanpa verifikasi lapangan.

Melalui unit bisnis PT Ekamas Fortuna, APP juga tercatat sebagai pelapor aktif dalam kerangka *United Nations Global Compact* (UNGC) dengan status *Advanced Communication on Progress (COP)*, yang menunjukkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik operasional.⁵⁸ Pada 2022, APP mendapat rating “Outstanding” dari *EcoVadis*, mencerminkan kinerja tinggi dalam aspek lingkungan, HAM, etika, dan pengadaan berkelanjutan, berdasarkan standar internasional seperti ISO 26000, UNGC, dan GRI.⁵⁹

Secara nasional, APP menyatakan bahwa kebijakan *Forest Conservation Policy (FCP)* yang diterapkan sejak 2013 berkontribusi terhadap penurunan deforestasi. Data Global Forest Watch menunjukkan penurunan kehilangan tutupan hutan primer dari 929.000 ha pada tahun 2016 menjadi 203.000 ha pada tahun 2021.⁶⁰ Namun, menurut World Resources Institute (WRI), tren ini lebih merupakan hasil kolektif dari kebijakan pemerintah,

penegakan hukum, dan tekanan masyarakat sipil, bukan semata kontribusi APP.⁶¹

1. Tantangan Implementasi Sustainability Roadmap Vision 2020

Meskipun Asian Pulp and Paper (APP) telah menyusun *Sustainability Roadmap Vision 2030* untuk mendukung pencapaian SDGs 13 dan 15, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Sejumlah lembaga independen seperti *Greenpeace* dan *Environmental Paper Network (EPN)* menyoroti bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya terwujud di tingkat lapangan. Salah satu isu utama adalah tuduhan bahwa APP masih terlibat dalam deforestasi melalui afiliasi pemasok kayu yang beroperasi di kawasan hutan primer. Misalnya, laporan *Greenpeace* pada 2020 menyebutkan bahwa sejak 2013 hingga 2018, terdapat indikasi pembukaan lahan gambut di atas 32 ribu hektare oleh pemasok APP di Sumatra dan Kalimantan.⁶² Meskipun APP mengklaim telah memutuskan hubungan dengan perusahaan pemasok tersebut, investigasi lanjut dari *Eyes on the Forest* menunjukkan bahwa relasi bisnis tetap terjadi melalui struktur kepemilikan tidak langsung.⁶³

Di sisi lain, program konservasi dan restorasi yang dicanangkan APP juga dinilai tidak memiliki kerangka

⁵⁶ Carbon Disclosure Project. (2021a). *Forests 2021: Timber scoring methodology and results*. <https://www.cdp.net/en/forests>

⁵⁷ Carbon Disclosure Project. (2021b). *Climate Change 2021: Scores and insights*. <https://www.cdp.net/en/scores>

⁵⁸ United Nations Global Compact. (2020). *Communication on Progress: PT Ekamas Fortuna*. <https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/advanced/458732>

⁵⁹ EcoVadis. (2022). *Sustainability Ratings Methodology Overview*. <https://ecovadis.com/solutions/ratings>

⁶⁰ Global Forest Watch. (2022). *Indonesia: Primary Forest Loss*. Diakses dari: <https://www.globalforestwatch.org>

⁶¹ World Resources Institute. (2021). *6 Graphs Explain Indonesia's Deforestation Progress and Challenges*. Diakses dari:

<https://www.wri.org/insights/indonesia-deforestation>

⁶² Greenpeace Southeast Asia. (2020). *Investigasi pembukaan lahan gambut oleh APP*. Diakses dari <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/43721/>

⁶³ Eyes on the Forest. (2021). *Laporan konservasi dan rantai pasok APP*. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id/news/report-reveals-facts-behind-apps-conservation-claims>

pengawasan yang cukup kuat. Environmental Paper Network dalam laporannya pada 2019 mengungkapkan bahwa area restorasi sebesar 600 ribu hektare yang diklaim APP sulit diverifikasi secara independen, karena tidak ada keterlibatan penuh dari lembaga pemantau eksternal.⁶⁴

Dalam aspek sosial, APP juga dikritik atas lambatnya penyelesaian konflik dengan masyarakat adat dan lokal. Rainforest Action Network (RAN) pada 2020 mencatat setidaknya 107 konflik lahan yang masih aktif antara APP dan komunitas lokal, sebagian besar terkait dengan tumpang tindih klaim lahan dan ketidakjelasan proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).⁶⁵ Laporan independen dari Koalisi Anti Mafia Hutan menambahkan bahwa mediasi yang dilakukan APP cenderung bersifat formalitas dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat secara substansial.⁶⁶ Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi prinsip keberlanjutan sosial yang menjadi pilar utama SDGs 15.

Secara keseluruhan, meskipun APP telah menunjukkan komitmen di atas kertas melalui penyesuaian terhadap *SDGs Compass* dan standar GRI, berbagai temuan menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Dominasi pendekatan deklaratif, lemahnya mekanisme verifikasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor yang memperlemah efektivitas *Sustainability Roadmap Vision 2030*. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah komitmen keberlanjutan APP lebih bersifat reaktif terhadap tekanan eksternal daripada

dilandasi kesadaran transformasional yang sejati.

KESIMPULAN

Asian Pulp and Paper (APP) menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif yang selaras dengan tujuan SDGs 13 dan 15. Melalui kebijakan *Forest Conservation Policy* (FCP), pelestarian lahan gambut, sistem rantai pasok berkelanjutan, hingga pelibatan masyarakat, APP berupaya meminimalkan deforestasi dan dampak lingkungan lainnya.

APP juga telah mengintegrasikan pendekatan keberlanjutannya dengan *SDGs Compass*, yang menjadi panduan implementasi SDGs bagi sektor bisnis. Langkah ini mencakup proses penilaian dampak, penetapan prioritas, integrasi ke dalam strategi bisnis, serta pengukuran dan pelaporan secara berkala melalui *Sustainability Roadmap: Vision 2020* dan lanjutan Vision 2030.

Namun, efektivitas kontribusi tersebut masih dominan pada tingkat output, seperti kebijakan dan pelaporan, sementara outcome dan impact belum dapat diverifikasi secara independen. Penilaian pihak eksternal dan audit objektif terhadap dampak lingkungan serta perubahan perilaku aktor masih terbatas.

Dengan menggunakan kerangka teori efektivitas rezim Ronald B. Mitchell, dapat disimpulkan bahwa SDGs berperan penting dalam memperkuat legitimasi dan pemingkanaan norma global di tingkat korporasi. Namun, untuk mengukur

⁶⁴ WWF Indonesia. (2019). *Laporan evaluasi keberlanjutan APP*. Diakses dari <https://www.wwf.or.id/>

⁶⁵ Rainforest Action Network. (2020). *Constant conflict: Unresolved land disputes still haunt APP*. <https://www.ran.org/the-understory/constant-conflict-unresolved-land-disputes-still-haunt-asia-pulp-and-paper>

⁶⁶ Koalisi Anti Mafia Hutan. (2019, 15 Mei). *Pengakuan APP/Sinar Mas mengenai keterhubungannya dengan perusahaan-perusahaan bermasalah* (Siaran Pers). Eyes on the Forest. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id/news/siaran-pers-kamh-menuntut-transparansi-appsinar-mas-tentang-perusahaan-pemasok-kayu>

efektivitas penuh, dibutuhkan waktu, transparansi, dan pengawasan independen yang lebih kuat, khususnya hingga program *Sustainability Roadmap: Vision 2030* rampung sepenuhnya.

SARAN

Merujuk pada temuan studi ini, terdapat beberapa implikasi strategis yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi APP (Asian Pulp and Paper) Disarankan untuk meningkatkan transparansi implementasi program keberlanjutan melalui pelibatan pihak independen dalam pemantauan dan verifikasi. Pendekatan ini dapat memperkuat kredibilitas dan mengurangi risiko *greenwashing*. Selain itu, APP perlu memperdalam pelibatan masyarakat adat dan lokal guna meminimalisasi konflik lahan serta memastikan bahwa konservasi memberikan dampak sosial yang positif.
2. Bagi Pemerintah Indonesia Pemerintah perlu menguatkan regulasi serta sistem monitoring sektor kehutanan untuk memastikan bahwa komitmen korporasi berdampak nyata di lapangan. Integrasi yang lebih strategis antara target SDGs nasional dan inisiatif sektor swasta perlu dikembangkan agar kontribusi non-negara menjadi substantif, bukan hanya administratif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Diperlukan studi lanjutan berbasis lapangan untuk mengevaluasi dampak implementasi *Sustainability Roadmap Vision 2030* secara menyeluruh. Selain itu, kerangka efektivitas rezim dari Ronald B. Mitchell perlu diuji lebih lanjut, khususnya dalam konteks perusahaan yang telah mengadopsi agenda keberlanjutan sebelum pembentukan norma internasional,

guna memahami sumber legitimasi korporasi secara lebih mendalam.

REFERENSI

- APP. (n.d.). *Forest Conservation Policy*. Diakses pada 8 Oktober 2024, dari <https://app.co.id/in/forest-conservation-policy>
- Aprillia, D. M., & Pazli. (2016). Faktor-faktor penghambat implementasi kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam skema REDD+ di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (2013–2015). *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, 3(2), 1–15. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/10491>
- Asia Pulp & Paper Group. (2012, November 14). *Asia Pulp and Paper Achieves Highest Standards of Timber Legality Certification*. Diakses dari <https://app.co.id/-/asia-pulp-and-paper-achieves-highest-standards-of-timber-legality-certification>
- Asia Pulp & Paper Group. (2013, Februari 5). *Sustainability Roadmap Vision 2020 and Forest Conservation Policy (FCP)*. Diakses dari halaman FAQ FCP dan Sustainability Roadmap
- Asia Pulp & Paper. (2013). *Forest Conservation Policy*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/forest-conservation-policy/>
- Asia Pulp & Paper. (2013). *Sustainability Roadmap Vision 2020 and Forest Conservation Policy*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/>
- Asia Pulp & Paper. (2013). *Sustainability Roadmap: Vision 2020 and Forest Conservation Policy*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/>
- Asia Pulp & Paper. (2020). *Sustainability Report 2020*. Diakses dari <https://www.asiapulppaper.com/sustainability/reporting/sustainability-reports/>
- Asia Pulp & Paper. (n.d). *Perkembangan Forest Conservation Policy (FCP) dalam Mendukung Konservasi Hutan di Indonesia*. Diakses dari <https://app.co.id/in/-/perkembangan-forest-conservation-policy-fcp-dalam-mendukung-konservasi-hutan-di-indonesia>
- Asia Pulp and Paper. (n.d.). *Sustainability Roadmap Vision 2020*. Diakses dari

- <https://app.co.id/in/sustainability-roadmap-vision-2020>
- Author not listed. (2010, September). *Asia Pulp & Paper fumbles response to deforestation allegations by Greenpeace*. Mongabay. Retrieved from <https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace/>
- Author not listed. (2011, November). *War of words between Greenpeace, Asia Pulp & Paper over deforestation allegations*. Mongabay. Retrieved from <https://news.mongabay.com/2011/11/war-of-words-between-greenpeace-asia-pulp-paper-over-deforestation-allegations/>
- Carbon Disclosure Project. (2021a). *Forests 2021: Timber scoring methodology and results*. <https://www.cdp.net/en/forests>
- Carbon Disclosure Project. (2021b). *Climate Change 2021: Scores and insights*. <https://www.cdp.net/en/scores>
- EcoVadis. (2022). *Sustainability Ratings Methodology Overview*. <https://ecovadis.com/solutions/ratings>
- Environmental Paper Network, & Forest Peoples Programme. (2019, 1 Oktober). *New study reveals Asia Pulp & Paper involved in hundreds of conflicts with local communities as haze crisis intensifies*. Business & Human Rights Resource Centre. Diakses dari <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-study-reveals-asia-pulp-papersinar-mas-involvement-in-hundreds-of-community-conflicts/>
- Eyes on the Forest. (2007). *New APP logging road threatens one of world's biggest carbon-storing forests*. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id>
- Eyes on the Forest. (2008). *Deforestation in Riau*. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id>
- Eyes on the Forest. (2021). *Laporan konservasi dan rantai pasok APP*. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id/news/report-reveals-facts-behind-apps-conservation-claims>
- Forests & Finance. (2019). *Asia Pulp and Paper (APP) case study on Indonesian pulp industry dominance and environmental impact*. Diakses dari <https://forestsandfinance.org/case-studies/asia-pulp-and-paper/>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233.
- <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Gebhard, C. (2022). *Levels of Analysis*. In S. McGlinchey (Ed.), *Foundations of International Relations*. Bloomsbury. Diakses dari <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations/>
- Global Forest Watch. (2022). *Indonesia: Primary Forest Loss*. Diakses dari: <https://www.globalforestwatch.org>
- Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, & World Business Council for Sustainable Development. (2015). *SDG Compass: The guide for business action on the SDGs*. Diakses dari <https://sdgcompass.org>
- GreenpeaceSoutheast Asia. (2011, October 5). *Success: Barbie and Mattel drop deforestation!* Diakses dari <https://www.greenpeace.org/southeastasia/story/1064/success-barbie-and-mattel-drop-deforestation/>
- GreenpeaceSoutheast Asia. (2020). *Investigasi pembukaan lahan gambut oleh APP*. Diakses dari <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/43721/>
- Greenpeace. (2010). *How Sinar Mas is Pulping the Planet*. GreenpeaceInternational. <https://www.greenpeace.org/international/publication/>
- Indonesia Deforestation Rates & Statistics. Global Forest Watch. Diakses 30 Juli 2024. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?lang=id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)*. Diakses dari <https://proper.menlhk.go.id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)*. Diakses dari <https://silk.menlhk.go.id/>
- Koalisi Anti Mafia Hutan. (2019, 15 Mei). *Pengakuan APP/Sinar Mas mengenai keterhubungannya dengan perusahaan-perusahaan bermasalah* (Siaran Pers). Eyes on the Forest. Diakses dari <https://www.eyesontheforest.or.id/news/siaran-pers-kamh-menuntut-transparansi-appsinar-mas-tentang-perusahaan-pemasok-kayu>
- Mitchell, R. B. (1994). Regime design matters: intentional oil pollution and treaty compliance. *International Organization*, 48(3), 425–458. <https://doi.org/10.1017/S0020818300028253>

- Mitchell, R. B. (1994). Regime design matters: intentional oil pollution and treaty compliance. *International Organization*, 48(3), 425–458. <https://doi.org/10.1017/S0020818300028253>
- Mitchell, R. B. (2002). A quantitative approach to evaluating international environmental regimes. *Global Environmental Politics*, 2(4), 58–83. <https://doi.org/10.1162/152638002320980623>
- Mitchell, R. B. (2008). Evaluating the performance of environmental institutions. In O. R. Young, L. A. King, & H. Schroeder (Eds.), *Institutions and Environmental Change: Principal Findings, Applications, and Research Frontiers* (pp. 79–114). MIT Press <https://academic.oup.com/edited-volume/42625/chapter/410435230>
- Mitchell, R. B., & Chayes, A. H. (1998). Managing compliance: A comparative perspective. Dalam E. B. Weiss & H. Jacobson (Eds.), *Engaging countries: Strengthening compliance with international environmental accords* (hal. 39–62). MIT Press.
- Mongabay. “Asia Pulp & Paper Fumbles Response to Deforestation Allegations by Greenpeace.” *Mongabay Environmental News*, 28 September 2010. Diakses pada 30 Juli 2025, dari <https://news.mongabay.com/2010/09/asia-pulp-paper-fumbles-response-to-deforestation-allegations-by-greenpeace>.
- Ojo, M. (2019). Role of NGOs in sustainable development: Addressing imbalances in global governance structures. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3479317>
- Pattberg, P., & Widerberg, O. (2016). Transnational multistakeholder partnerships for sustainable development: Conditions for success. *Ambio*, 45(1), 42–51. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0684-2>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- PW Consulting. (2024). What role do sustainability certifications play in shaping procurement strategies for pulp buyers? *pmarketresearch.com*. Diakses dari <https://pmarketresearch.com/chemi/pulp-market/>
- Rainforest Action Network. (2010). *Turning the Page on Rainforest Destruction: Why Asia Pulp & Paper is Not a Responsible Pulp Supplier*. Diakses dari <https://www.ran.org>
- Rainforest Action Network. (2020). *Constant conflict: Unresolved land disputes still haunt APP*. [https://www.ran.org/the-understory/constant-conflict-unresolved-land-disputes-still haunt asia pulp and paper](https://www.ran.org/the-understory/constant-conflict-unresolved-land-disputes-still-haunt-asia-pulp-and-paper)
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38715/uu-no-32-tahun-2009>
- Ruggie, J. G. (2004). Reconstituting the global public domain: Issues, actors, and practices. *European Journal of International Relations*, 10(4), 499–531. <https://doi.org/10.1177/1354066104047847>
- Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2019). *Sustainable development report 2019*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network. https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
- United Nations Convention to Combat Desertification. (n.d.). *Global Land Outlook: Overview*. Diakses dari <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook/overview>.
- United Nations Global Compact. (2020). *Communication on Progress: PT Ekamas Fortuna*. <https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/advanced/458732>
- United Nations, “Sustainable Development Goals : Climate Change,” <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>, (diakses pada 11 September 2023)
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.

<https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>

- World Resources Institute. (2021). *6 Graphs Explain Indonesia's Deforestation Progress and Challenges*. Diakses dari: <https://www.wri.org/insights/indonesia-deforestation>
- WWF Indonesia. (2019). *Laporan evaluasi keberlanjutan APP*. Diakses dari <https://www.wwf.or.id/>